



**PENGARUH PENERAPAN PPKM DARURAT PADA MASA PANDEMI
COVID-19 TERHADAP PENURUNAN PENDAPATAN UMKM
(Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Desa Bandungsari,
Sukodadi, Lamongan)**

Nasruddin¹, Riza Qomariyah Yansari²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
nasruddin@uinsby.ac.id¹



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penerapan PPKM Darurat bertujuan untuk mengurangi angka paparan Covid-19 sehingga dapat memutus rantai penularan virus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan PPKM Darurat terhadap penurunan pendapatan UMKM dengan menggunakan aplikasi pengolahan data spss 16.0. Penelitian ini melibatkan 30 orang responden yang terdiri dari pelaku UMKM di Desa Bandungsari, Sukodadi, Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan PPKM Darurat terhadap penurunan pendapatan bagi pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19. Pelaku UMKM yang sebelumnya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari Rp300.000 per hari, pendapatannya menjadi merosot drastis hingga kurang dari Rp300.000 ketika dilaksanakan PPKM Darurat, mereka itu yang rata-rata bergerak di bidang toko kelontong, penjual sayur, dan pekerja serabutan yang memiliki usaha sampingan untuk menyambung hidup sehari-sehari. Hal tersebut terjadi akibat adanya peraturan yang membatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB, adanya ketentuan makan/minum di tempat umum, misalnya bagi pemilik warung makan dilarang untuk melayani dine-in, serta membatasi 50 persen pengunjung yang membeli makanan dan minuman untuk dibawa pulang atau dengan menggunakan jasa pengantar makanan.

Kata Kunci: PPKM Darurat; Pandemi Covid-19; Penurunan Pendapatan UMKM; Pelaku UMKM

Abstract: The implementation of the emergency public activity restriction (Emergency PPKM) aims to reduce the number of exposure to Covid-19 so that it can break the chain of virus transmission. This study aims to examine the effect of implementing emergency public activity restrictions on the decline in MSME income by using the SPSS 16.0 data processing application. This study involved 30 respondents consisting of MSME actors in Bandungsari Village, Sukodadi, Lamongan. Based on the results of the study, shows that there is an effect of

implementing emergency public activity restriction on the decline in income for MSME actors during the Covid-19 pandemic. MSME actors who previously could earn more than Rp300,000 per day, their income fell drastically to less than Rp300,000 when the emergency public activity restriction was implemented, they are mostly engaged in grocery stores, vegetable sellers, and freelancers who have a side business to survive daily. This situation occurs due to regulations that limit operating hours to 8 pm, provisions for eating/drinking in public places, for example, food stall owners are prohibited to serve dine-in, and limiting 50 percent of visitors who buy food/drinks to take home or by using food delivery services.

Keywords: *Emergency PPKM; Covid-19 Pandemic; Decrease in MSME Income; MSME actors*

PENDAHULUAN

Covid-19 atau *Corona Virus Disease 19* melanda Indonesia sejak Maret 2020. Penyebaran virus yang begitu cepat menyebabkan sekitar 215 negara di seluruh dunia mengalami krisis kesehatan. Berdasarkan keadaan tersebut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan himbauan kepada seluruh negara agar menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk sementara waktu. Indonesia tidak tinggal diam selama Covid-19 merebak, berbagai cara dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, antara lain dimulai dengan adanya langkah beberapa daerah yang memutuskan untuk melakukan penutupan akses jalan hingga membatasi aktivitas keluar masuk warga yang ada di daerah tersebut atau yang biasa disebut dengan *social distancing*.

Selain itu, untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan 5M, yaitu kegiatan rutin mencuci tangan dengan air mengalir hingga bersih, memakai masker ketika berada di luar rumah ataupun ketika berada di dalam rumah dalam kondisi tertentu, menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain yang berada di sekitar kita, menghindari keramaian yang berpotensi menyebabkan kerumunan pada saat di luar rumah, serta mengurangi mobilitas apabila tidak memiliki keperluan yang mendesak atau penting. Kemudian pemerintah juga telah mengupayakan kepada seluruh masyarakat agar dapat mengikuti program vaksinasi yang berfungsi untuk menciptakan imunitas dalam tubuh. Dengan melakukan vaksinasi, diharapkan akan mampu mengurangi resiko penularan dan mengurangi dampak berat yang disebabkan oleh infeksi Covid-19. Sehingga dapat menurunkan angka kematian yang disebabkan infeksi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 sangat pesat, membuat pemerintah menerapkan peraturan pembatasan sosial dengan skala besar yang bertujuan memberikan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Akan tetapi, setelah pembatasan ini

diterapkan belum terjadi perubahan secara signifikan. Dengan demikian, pemerintah mengubah peraturan tersebut menjadi skala mikro sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 atau PPKM Darurat untuk mengatur setiap kegiatan masyarakat, termasuk juga dalam kegiatan bisnis yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Menindaklanjuti intruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 serta keputusan yang diberikan oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Nomor: 188/379/KPTS/013/2021, Bupati Lamongan memberikan Intruksi Nomor 4 Tahun 2021 kepada masyarakat mengenai penerapan PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam instruksi tersebut dapat digaris bawahi antara lain; (1) Dalam melaksanakan kegiatan sektor esensial di bidang keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, diberlakukan pembatasan maksimal 50 % staf yang dapat melakukan pekerjaan di kantor disertai dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; (2) Berbagai tempat yang menjual bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 WIB, tempat tersebut antara lain supermarket, pasar swalayan, pasar tradisional, dan toko kelontong; (3) Pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat yang berpusat pada perdagangan ditutup. Warung, pedagang makanan kaki lima, lapak pinggir jalan, dan pusat perbelanjaan yang menyediakan tempat untuk makan hanya boleh menerima pesanan makanan untuk dibungkus sebab adanya larangan makan di tempat.

Penerapan kebijakan ini menjadi sebuah tantangan baru yang dihadapi para pelaku usaha di Indonesia, di mana mereka harus berupaya untuk terus bertahan bahkan memulihkan bisnis yang dijalankannya selama penerapan PPKM Darurat. Himbauan yang diberlakukan pada saat PPKM Darurat selama lebih dari dua pekan, yaitu seperti memperketat pelaksanaan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat guna memutus rantai penularan virus yang berbahaya sehingga dapat mengurangi angka peningkatan kasus Covid-19 di kemudian hari. Kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 nyatanya di sisi lain justru menimbulkan dampak negatif pada sektor ekonomi, khususnya dalam kegiatan UMKM atau usaha kecil mikro menengah.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan sebagai pembaruan dari penelitian terdahulu. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah pengaruh yang dirasakan oleh

pelaku usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan yang sebagian besar hanya bergerak di bidang toko kelontong, penjual sayur, dan seorang serabutan yang mempunyai usaha kecil-kecilan dengan hasil pendapatannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat pengaruh adanya PPKM Darurat pada masa pandemi Covid-19 terhadap pelaku UMKM.

Penelitian terdahulu merupakan ilmu dengan cara berpikir untuk menghasilkan kesimpulan yang berupa ilmu pengetahuan menggunakan langkah-langkah tertentu dengan didukung fakta yang empiris dan logis. Berikut tabel penelitian terdahulu yang dirangkum oleh penulis:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Metode	Perbedaan	Persamaan
1	Alvia Pratiwi Putri, dkk (2020) Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Desa Blado, Kabupaten Batang)	Deskriptif Kualitatif	Pendapatan UMKM di Desa Blado selama pandemi mengalami penurunan yang diakibatkan adanya wabah Covid-19.	meneliti tentang penyebab penurunan pendapatan saat pandemi Covid-19.
2	Andi Amri (2020) Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia 2020	Deskriptif Kualitatif	Adanya kebijakan yang diterapkan agar tetap kompetitif dalam melindungi UMKM walaupun di tengah wabah pandemi Covid-19 yang melanda, kebijakan ini diperlukan mengingat kondisi saat ini UMKM terus mengalami penurunan, di mulai dari penurunan kapasitas hingga penurunan pendapatan ketika terjadi pandemi Covid-19.	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya masing-masing memiliki kesamaan dalam yaitu kondisi UMKM ditengah pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan pendapatan.

No	Nama/Judul/Tahun	Metode	Perbedaan	Persamaan
3	Mirza Ayunda Pratiwi, dkk (2020) Kondisi dan Strategi UMKM di saat Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang	Campuran kuantitatif dan kualitatif	Dampak yang cukup besar dirasakan oleh pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yang mengakibatkan turunnya pendapatan.	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya masing-masing memiliki kesamaan dalam meneliti yaitu berkaitan dengan penurunan pendapatan pelaku usaha yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

(Penulis, 2021)

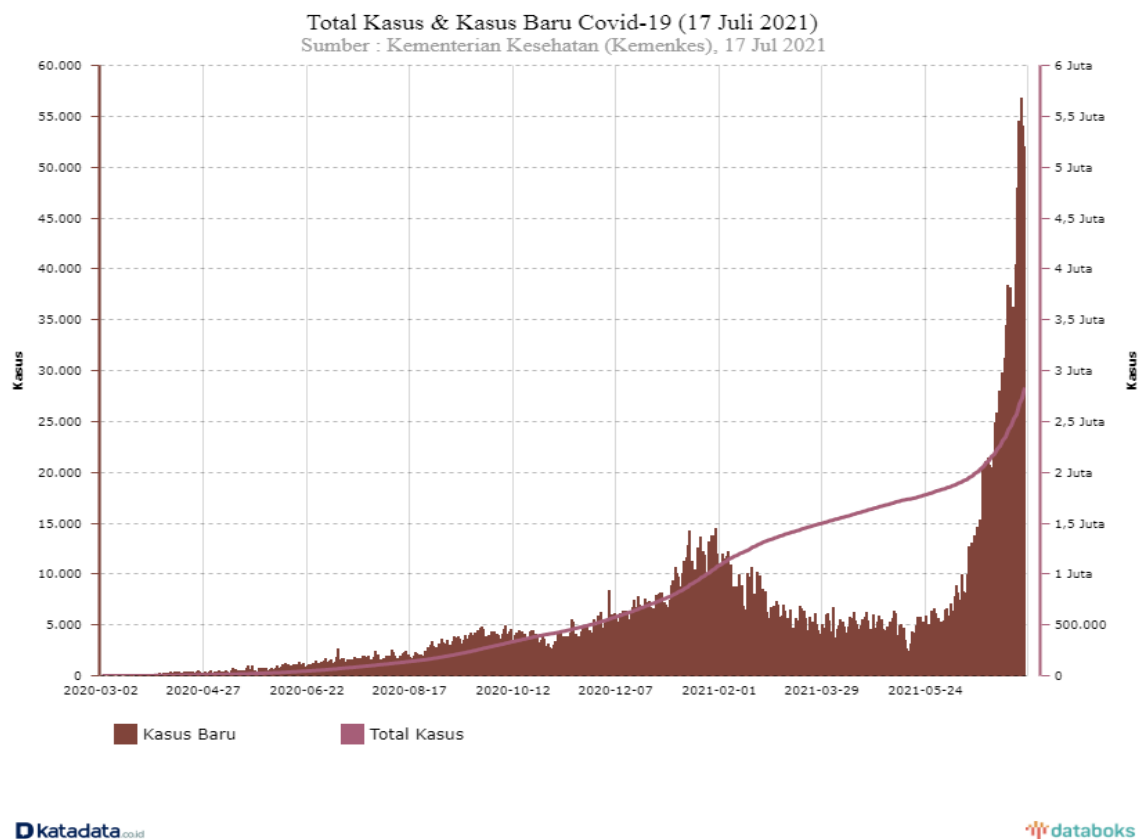
Penerapan PPKM Darurat pada Masa Pandemi Covid-19

Di awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan menyebarnya virus baru, *corona* yang diberi nama resmi oleh *Komite Taksonomi Virus Internasional*, Wuhan, China dengan sebutan nama SARS-CoV-2 yang merupakan singkatan dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*. Virus *corona* merupakan suatu virus yang dapat menimbulkan penyakit menular dan memiliki jenis baru yang disebut dengan Covid-19 atau kependekan dari *Corona Virus Disease 2019*, virus ini awalnya diketahui menyebar pada tahun 2019 di Kota Wuhan, China (Ilmiyah, 2020).

Pada awalnya proses penyebaran virus ini belum dapat diidentifikasi untuk menjawab apakah virus disebarkan melalui kontak antar manusia ataukah kontak antara manusia dengan hewan. Setelah melakukan penelusuran lebih dalam akhirnya dapat dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia dapat menular dari manusia ke manusia lainnya dari adanya kasus tenaga medis terinfeksi oleh pasien yang diduga termasuk ke dalam kasus “*super spreader*”. Covid-19 disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang merupakan penyakit menular, sehingga menyebabkan terinfeksi saluran pernapasan seperti sedang mengalami flu berat. Gejala yang dialami penderita Covid-19 pada umumnya adalah sesak nafas, demam hingga suhu mencapai 38°C, batuk kering, kehilangan indera penciuman serta indera perasa, dan yang paling buruk adalah berdampak pada kematian.

Sejak ditemukannya kasus Covid-19 yang menyebar luas dan menyebabkan pandemi global yang masih berlangsung hingga saat ini, telah mendorong banyak pihak ikut serta dalam upaya mengatasi persebaran virus. Dokter umum serta dokter spesialis juga turut

memberikan penjelasan serta himbauan agar masyarakat menjaga lingkungan serta kesehatan, sekaligus menghindari kegiatan yang tidak penting di luar rumah (Irene, et al., 2020).



Gambar 1. Grafik Total Kasus Baru Covid-19 Per 17 Juli 2021
(Kementerian Kesehatan, 2021)

Per 17 Juli 2021, total kasus dan kasus baru di Indonesia mencapai 5,5 juta. Pemerintahan Indonesia tidak tinggal diam dalam mengatasi masalah pandemi ini, berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri lebih tepatnya pada Nomor 15 Tahun 2021 mengenai penerapan kegiatan masyarakat untuk mengurangi mobilitas atau PPKM Darurat, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, wilayah Jawa dan Bali menerapkan PPKM Darurat sesuai dengan kriteria level keadaan pandemi pada masing-masing daerah. Intruksi serta arahan tersebut adalah pembatasan pada kegiatan masyarakat dengan skala mikro serta meningkatkan adanya posko-posko tanggap untuk menangani masalah Covid-19 dimulai dari tingkat paling rendah yaitu desa dan kelurahan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam melengkapi pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam Negeri, khusus dalam bidang ekonomi diintruksikan, antara lain: (1) Terdapat 121 kabupaten atau kota yang termasuk ke dalam level 4 dan level 3; (2) Penerapan level wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan disesuaikan dengan pedoman pada indikator, dalam upaya yang dilakukan

untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial untuk penanggulangan pandemi; (3) PPKM Darurat diterapkan pada wilayah yang termasuk wilayah level 4 dan level 3, dengan melakukan kegiatan belajar mengajar 100% di rumah, kegiatan pada sektor non esensial dilaksanakan 100% di rumah, kegiatan pada sektor esensial dilaksanakan dengan kapasitas 50% di kantor yang menerapkan protokol kesehatan ketat, kegiatan pada tempat yang melayani kebutuhan sehari-hari seperti toko kelontong, pasar tradisional, dan lainnya dengan kapasitas pengunjung hanya 50% serta pembatasan pada jam operasional yang dibuka hingga pukul 20.00 WIB guna mengurangi kerumunan; (4) Adanya penguatan untuk 3T (*testing, tracing, treatment*) yang harus benar-benar diterapkan. *Testing* dalam hal ini perlu ditingkatkan, sehingga dapat diukur dengan mengetahui angka yang menunjukkan seberapa besar orang yang terinfeksi virus atau tingkat *positivity rate mingguan* dengan ketentuan yang tetap disesuaikan antara lain :

Tabel 2. *Testing*

Positivity rate mingguan	Jumlah target tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5% - <15%	5
>15% - <25%	10
>25%	15

(Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15, 2021)

Percobaan atau *Testing* senantiasa digencarkan, sehingga mencapai sasaran pada <10% untuk *positivity rate* meningkatkan suspek dengan cara terus menggali informasi pada orang sekitar untuk di tes mereka yang merasakan gejala-gejala dan masyarakat yang pernah melakukan riwayat kontak dengan kasus seseorang yang termasuk alumni dalam daftar orang terpapar virus Covid-19. Target orang yang di tes per hari dapat dilihat sebagai berikut untuk daerah di provinsi Jawa Timur :

Tabel 3. Target *Testing*

PROVINSI JAWA TIMUR	
KOTA/KABUPATEN	JUMLAH TARGET ORANG DITES/HARI
Kabupaten Bangkalan	2150
Kabupaten Banyuwangi	2318
Kabupaten Blitar	2502
Kabupaten Bojonegoro	1793
Kabupaten Bondowoso	1677
Kabupaten Gresik	2877
Kabupaten Jember	3531
Kabupaten Jombang	1820

PROVINSI JAWA TIMUR	
KOTA/KABUPATEN	JUMLAH TARGET ORANG DITES/HARI
Kabupaten Kediri	2267
Kota Batu	453
Kota Blitar	308
Kota Kediri	624
Kota Madiun	381
Kota Malang	1886
Kota Mojokerto	281
Kota Pasuruan	436
Kota Probolinggo	345
Kota Surabaya	6254
Kabupaten Lamongan	2581
Kabupaten Lumajang	748
Kabupaten Madiun	1469
Kabupaten Magetan	1363
Kabupaten Malang	5651
Kabupaten Mojokerto	2436
Kabupaten Nganjuk	2272
Kabupaten Ngawi	1801
Kabupaten Pacitan	1194
Kabupaten Pamekasan	1925
Kabupaten Pasuruan	3536
Kabupaten Ponorogo	1880

(Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15, 2021)

Tracing dilakukan apabila telah kontak erat lebih dari 15 per kasus yang terkonfirmasi sehingga perlu dilakukan karantina, akan tetapi apabila hasil tes pemeriksaan menunjukkan positif maka harus isolasi. Karantina pada hari ke-4 atau ke-5 harus dilaksanakan pemeriksaan kembali untuk mengetahui virus tersebut apakah dapat terdeteksi selama dalam waktu penyebaran, apabila hasil menunjukkan negatif maka masa karantina berakhir. Dalam proses *treatment* harus dilakukan secara komprehensif, dapat dibedakan penderita yang mengalami gejala ringan, sedang, maupun berat. Sebelum kondisi penderita kritis sehingga memerlukan rawat inap di rumah sakit maka hal tersebut dapat dihindari sejak dini dengan isolasi secara ketat saat merasakan gejala ringan untuk mengurangi tali penularan; (5) Gubernur, Walikota dan Bupati supaya mempercepat proses penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sebab hal tersebut menjadi penjaring dalam pengamanan sosial secara matang dalam proses mendukung pelaksanaan aturan dari Pemerintah yaitu penerapan PPKM Darurat di wilayah yang masuk dalam daftar level 4 dan level 3; (6) Untuk para pelaku usaha yang tidak menerapkan ketentuan sesuai dengan Instruksi yang diberikan, maka dalam hal ini

akan diberikan sanksi secara administratif bagi pelaku usaha di bidang pusat perbelanjaan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, bidang transportasi umum, dan tempat makan. Apabila hal tersebut terjadi maka bukan hanya dikenakan sanksi administratif, tetapi bisa juga sampai menutup usaha yang sudah disamakan oleh pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang tersedia dalam perundang-undangan (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15, 2021).

Pengaruh Penerapan PPKM Darurat pada Masa Pandemi Covid-19

Penerapan PPKM secara mikro diterapkan di wilayah level 4 dan level 3 yaitu Pulau Jawa dan Bali yang mencakup 121 kota dan kabupaten, pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa lokasi ini telah dipilih oleh pemerintah sesuai dengan alat ukur suatu keberhasilan laju penularan serta volume respon yang didasarkan pada standar World Health Organization. Pemerintah menargetkan penurunan kasus Covid-19 sebanyak 10.000 per hari dengan memperketat kegiatan masyarakat seperti penutupan kegiatan di pusat perdagangan, menginstruksi resto/kedai agar hanya melayani pembelian secara *delivery* atau *take away*, menginstruksikan kegiatan di sektor non esensial agar 100% dilakukan di rumah. Berikut merupakan daftar wilayah level 3 dan 4 PPKM Darurat Covid-19 Pulau Jawa dan Bali:

Kabupaten/Kota	Provinsi	Level	Kabupaten/Kota	Provinsi	Level
Kota Denpasar	Bali	Level 3	Kabupaten Tangerang	Banten	Level 3
Kabupaten Jembrana	Bali	Level 3	Kabupaten Serang	Banten	Level 3
Kabupaten Buleleng	Bali	Level 3	Kabupaten Lebak	Banten	Level 3
Kabupaten Badung	Bali	Level 3	Kota Cilegon	Banten	Level 3
Kabupaten Gianyar	Bali	Level 3	Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta	Level 4
Kabupaten Klungkung	Bali	Level 3	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	Level 4
Kabupaten Bangli	Bali	Level 3	Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta	Level 4
Kota Tangerang Selatan	Banten	Level 4	Kabupaten Kulon Progo	DI Yogyakarta	Level 3
Kota Tangerang	Banten	Level 4	Kabupaten Gunung Kidul	DI Yogyakarta	Level 3
Kota Serang	Banten	Level 4	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Level 4
Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Level 4	Kabupaten/Kota	Provinsi	Level
Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Level 4	Kota Cimahi	Jawa Barat	Level 4
Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Level 4	Kota Bogor	Jawa Barat	Level 4
Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Level 4	Kota Bekasi	Jawa Barat	Level 4
Kabupaten Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Level 4	Kota Banjar	Jawa Barat	Level 4
Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	Level 4	Kota Bandung	Jawa Barat	Level 4
Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	Level 4	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	Level 4
Kota Sukabumi	Jawa Barat	Level 4	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	Level 4
Kota Depok	Jawa Barat	Level 4	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	Level 3
Kota Cirebon	Jawa Barat	Level 4	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Level 3
			Kabupaten Subang	Jawa Barat	Level 3

Sumber: Kementerian Koordinator Kematriman dan Investasi



Sumber: Kementerian Koordinator Kematriman dan Investasi



Gambar 2. Wilayah Level 3 dan 4 Pulau Jawa dan Bali (Databoks Katadata, 2021)

Kabupaten/Kota	Provinsi	Level	Kabupaten/Kota	Provinsi	Level
Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	Level 3	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	Level 3
Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	Level 3	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	Level 3	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	Level 3	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Garut	Jawa Barat	Level 3	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	Level 3	Kota Tegal	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Level 3	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	Level 3	Kota Semarang	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Level 3	Kota Salatiga	Jawa Tengah	Level 4
Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	Level 3	Kota Magelang	Jawa Tengah	Level 4

Kabupaten/Kota	Provinsi	Level	Kabupaten/Kota	Provinsi	Level
Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	Level 4	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	Level 4	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	Level 4	Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	Level 4	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	Level 3	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	Level 3	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Level 3	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	Level 3	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	Level 3	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	Level 3
Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	Level 3	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	Level 3

Sumber: Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi

Kabupaten/Kota	Provinsi	Level	Kabupaten/Kota	Provinsi	Level
Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	Level 3	Kota Surabaya	Jawa Timur	Level 4
Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	Level 3	Kota Mojokerto	Jawa Timur	Level 4
Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	Level 3	Kota Malang	Jawa Timur	Level 4
Kabupaten Blora	Jawa Tengah	Level 3	Kota Madiun	Jawa Timur	Level 4
Kabupaten Batang	Jawa Tengah	Level 3	Kota Kediri	Jawa Timur	Level 4
Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	Level 3	Kota Blitar	Jawa Timur	Level 4
Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Level 4	Kota Batu	Jawa Timur	Level 4
Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Level 4	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Madiun	Jawa Timur	Level 4	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	Level 4	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Level 3

Kabupaten/Kota	Provinsi	Level	Kabupaten/Kota	Provinsi	Level
Kabupaten Sampang	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	Level 3	Kota Probolinggo	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Level 3	Kota Pasuruan	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Jember	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Malang	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Magetan	Jawa Timur	Level 3	Kabupaten Blitar	Jawa Timur	Level 3

Sumber: Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi

Gambar 3. Wilayah Level 3 dan 4 Pulau Jawa dan Bali (Databoks Katadata, 2021)

Kabupaten/Kota	Provinsi	Level
Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Level 3
Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	Level 3

13 / 13

Sumber: Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi BBC

Gambar 4. Wilayah Level 3 dan 4 Pulau Jawa dan Bali (Databoks Katadata, 2021)

Kebijakan PPKM Darurat ini telah berdampak pada sektor ekonomi di Indonesia, terutama pada kegiatan UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi di Indonesia digambarkan bahwa terdapat sejumlah 1.785 koperasi yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari dan 163.713 pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan makanan/minuman telah terdampak pandemi Covid-19. Diharapkan setelah dilaksanakannya vaksinasi massal, kegiatan UMKM bisa berjalan seperti sediakala dan dapat dijadikan sebagai pendorong pemulihan ekonomi.

Penurunan Pendapatan UMKM pada Pelaku Usaha

PPKM Darurat dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada tanggal 3-20 Juli 2021 ini dinilai hanya memberikan sedikit manfaat pada sektor perekonomian sehingga dalam penanggulangan masalah yang dihadapi pelaku usaha, koperasi dan pemerintah melakukan beberapa upaya di antaranya dengan memberikan bantuan untuk pelaku usaha dan koperasi. Bantuan-bantuan tersebut antara lain seperti Kartu Prakerja, subsidi pada tarif listrik untuk pengguna 450VA dan 950VA, serta keringanan selama enam bulan pada pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terhitung sejak bulan April 2020 hingga bulan September 2020.

Berbagai upaya yang dilakukan guna membangkitkan UMKM salah satunya dengan meningkatkan permintaan daya beli masyarakat serta memanfaatkan teknologi digital untuk pelaku usaha dan koperasi sebagai media perdagangan elektronik yang dinilai mampu bertahan di tengah pandemi. Sepanjang tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19 media elektronik telah meningkatkan penjualan mencapai US\$130 miliar.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat adalah dengan memperpanjang bantuan sosial tunai pada tahun 2021 guna mendorong daya beli masyarakat. Keluarga penerima manfaat dari bantuan sosial tunai masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp300.000 dan berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menganggarkan bantuan sosial tunai sebesar Rp12 triliun selama 4 bulan untuk 10 juta keluarga.

Adapun bantuan lain untuk para pelaku usaha yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adanya bantuan ini diharapkan akan meningkatkan penjualan UMKM secara *online*, mengingat diterapkannya pembatasan jam operasional untuk kegiatan perdagangan. Penjualan secara *online* akan mempermudah masyarakat berbelanja tanpa harus keluar rumah, cukup dengan sekali klik pada gawai seseorang bisa berbelanja dari rumah.

Gambaran Umum Keadaan Ekonomi Desa Bandungsari

Secara geografis Kecamatan Sukodadi terletak pada jalan kereta api dengan jalur antara Jakarta-Surabaya, Bina Marga dan jalur jalan Arteri DPU. Kecamatan Sukodadi terletak di sebelah barat dari pusat Kota Kabupaten Lamongan dengan radius 18 km. Secara administratif batas wilayah Kecamatan Sukodadi sebagai berikut:

Tabel 4. Batas Wilayah Administratif Kecamatan Sukodadi

Perbatasan Wilayah Kecamatan Sukodadi	
Batas	Wilayah
Utara	Kecamatan Karanggeneng
Timur	Kecamatan Turi dan Kecamatan Lamongan
Selatan	Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kembangbahu
Barat	Kecamatan Pucuk

(Wikipedia, 2021)

Kecamatan Sukodadi merupakan jantung dari Kabupaten Lamongan yang memiliki luas wilayah 4.588,12 Ha, memiliki ketinggian daratan 0,7 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Sukodadi adalah 48.336 jiwa, terdiri dari 24.776 jiwa berjenis kelamin perempuan dan 23.560 jiwa berjenis kelamin laki-laki. Kecamatan Sukodadi mempunyai potensi yang menunjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan, keadaan sumber daya manusia yang cukup memadai menjadi potensi yang memiliki pendukung sehingga dapat mengikuti berbagai kegiatan bidang usaha sesuai kemampuan masing-masing sehingga memiliki sifat pantang menyerah untuk mengejar asa.

Warga Kecamatan Sukodadi sebagian besar bekerja mengurus tambak ataupun lahan pertanian yang saat ini mulai berkembang. Di samping itu ada juga yang menjalankan usaha, seperti usaha pembuatan tahu, keripik tahu/tempe, kerupuk dan roti yang dinilai cukup terkenal di Desa Bandungsari.

Desa Bandungsari merupakan desa kecil yang terletak di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Bandung, Dusun Bulu, Dusun Donak dan Dusun Mlaten. Desa Bandungsari berbatasan dengan beberapa desa yaitu,

berbatasan dengan Desa Plumpang yang terletak di bagian utara, sedangkan bagian timur berbatasan dengan Desa Tlogorejo, untuk yang bagian selatan berbatasan dengan Desa Balungawun, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Menongo. Jumlah penduduk di Desa Bandungsari 2.051 jiwa, yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani padi dengan pendapatan yang tidak menentu, sebab hasil panen padi tersebut berdasarkan musim.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data serta memiliki kegunaan tujuan tertentu (Sugiyono, 2013). Sedangkan pendapat Soeyono mengenai pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan perhitungan rata-rata, presentase, dan perhitungan statistik yang lain (Soewadji, 2012). Penelitian pada jurnal ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data kemudian dianalisis dalam bentuk angka guna mengetahui ditolak ataupun diterimanya sebuah hipotesis sesuai dengan data yang digunakan dalam analisis statistik.

Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan data berada di wilayah generalisasi yang mempunyai sebuah kualitas dan karakteristik yang baik untuk mempelajari subjek serta objek yang dijadikan sebagai kesimpulan dan memiliki jenis yang sama. Dalam penelitian ini menggunakan populasi Pelaku Usaha di Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 30 orang.

b. Sampel

Pendapat dari Chalid dan Ahmadi, mengenai sampel yang baik adalah digambarkan dengan keadaan populasi yang maksimal akan tetapi bukan hasil duplikat dari populasi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yaitu dengan cara mengumpulkan data dari orang-orang yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian pada jurnal ini menggunakan data primer yaitu dari hasil pengisian

kuesioner pelaku usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder didapatkan dari sumber bacaan berupa buku, jurnal, skripsi serta, data yang diambil dari internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam jurnal Pengaruh PPKM Darurat pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan Pendapatan UMKM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Sukodadi, Lamongan) ini.

Metode Pengumpulan Data dan Prosedur Analisis

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang Pengaruh Penerapan PPKM Darurat pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan Pendapatan UMKM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Sukodadi, Lamongan) yang harus dijawab oleh responden. Beberapa pertanyaan diambil dari penelitian terdahulu serta dibuat sendiri oleh penulis dengan pencatatan skala *likert* yang digunakan serta diartikan untuk mengukur pendapat seseorang serta sikap seseorang mengenai fenomena sosial yang terjadi saat ini. Penulisan skala dalam jurnal ini menggunakan 2 nilai, antara lain :

Sesuai : 1

Tidak Sesuai : 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengaruh Penerapan PPKM Darurat pada Masa Covid-19 terhadap Penurunan Pendapatan UMKM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Sukodadi, Lamongan)

Warga Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan sebagian besar bermata pencaharian petani, selain mengerjakan lahan pertanian yang saat ini mulai berkembang sebab pada tahun 2020 yang lalu, sawah yang ditanami padi terdampak hama tikus sehingga menyebabkan banyak warga yang beralih untuk menjadi pelaku usaha dengan membuka usaha sampingan.

Semenjak pandemi Covid-19 melanda negara Indonesia tercinta, banyak orang mengalami himpitan ekonomi. Penyebabnya tidak lain karena mereka harus kehilangan pekerjaannya sebagai sumber pendapatan akibat diberlakukannya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Orang-orang yang menganggur tersebut tidak memiliki sumber pendapatan

lagi sebagai biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kebutuhan sehari-hari mereka harus tetap terpenuhi jika ingin bertahan hidup.

Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini, termasuk adanya penerapan PPKM Darurat yang ternyata sangat berdampak terhadap pelaku usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Penerapan peraturan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan UMKM. Dengan demikian pelaku usaha berharap bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, untuk menunjang perekonomian warga yang terdampak agar pelaku usaha dapat memutar modalnya kembali dengan baik.

a. Deskripsi data responden

Data dari responden ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan responden dan sebagai informasi tambahan mengenai karakteristik responden. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

1. Nama Responden

Adapun data mengenai inisial nama responden dari 30 pelaku usaha di Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang diambil sebagai sampel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Inisial Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan

		Nama			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	A	1	3,3	3,3	3,3
	D	1	3,3	3,3	6,7
	E	2	6,7	6,7	13,3
	I	3	10,0	10,0	23,3
	K	1	3,3	3,3	26,7
	KH	1	3,3	3,3	30,0
	L	1	3,3	3,3	33,3
	LS	1	3,3	3,3	36,7
	N	4	13,3	13,3	50,0
	R	3	10,0	10,0	60,0
	S	5	16,7	16,7	76,7
	SH	1	3,3	3,3	80,0
	T	2	6,7	6,7	86,7
	W	2	6,7	6,7	93,3
	Y	1	3,3	3,3	96,7
	Z	1	3,3	3,3	100,0
	Total		30	100,0	100,0

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat inisial nama-nama responden sebanyak 30 orang, yang merupakan pelaku usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

2. Usia Responden

Tabel 6. Tabel Usia Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25	2	6,7	6,7	6,7
	27	1	3,3	3,3	10,0
	30	2	6,7	6,7	16,7
	32	1	3,3	3,3	20,0
	35	2	6,7	6,7	26,7
	37	1	3,3	3,3	30,0
	38	2	6,7	6,7	36,7
	39	1	3,3	3,3	40,0
	40	3	10,0	10,0	50,0
	41	1	3,3	3,3	53,3
	42	2	6,7	6,7	60,0
	43	1	3,3	3,3	63,3
	44	1	3,3	3,3	66,7
	45	1	3,3	3,3	70,0
	47	2	6,7	6,7	76,7
	48	1	3,3	3,3	80,0
	49	1	3,3	3,3	83,3
	50	4	13,3	13,3	96,7
	52	1	3,3	3,3	100,0
Total		30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 6, sebanyak 30 orang yang mengisi kuesioner, termasuk pelaku usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan.

3. Alamat

Tabel 7. Alamat Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan

		Alamat			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bandung	8	26,7	26,7	26,7
	Bulu	16	53,3	53,3	80,0
	Donak	3	10,0	10,0	90,0
	Mlaten	3	10,0	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Kuesioner, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 7, responden yang mengisi kuesioner terdiri dari warga yang ada di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dan terdiri dari 4 dusun. Sebanyak 8 pelaku usaha dari Dusun Bandung, sebanyak 16 pelaku usaha dari

Dusun Bulu, sebanyak 3 pelaku usaha dari Dusun Donak dan sebanyak 3 pelaku usaha dari Dusun Mlaten.

b. Deskripsi data penelitian

Setiap variabel akan dideskripsikan menggunakan *Frequency Table* dengan perolehan hasil penelitian berupa pengisian angket atau kuesioner dari jawaban responden yang diambil sebagai sampel merupakan pelaku usaha di Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan sebanyak 30 responden. Penelitian ini menggunakan berbagai variabel, di antaranya terdiri dari variabel independen (bebas) berupa; (1) Kepemilikan lapak; (2) Lama Usaha (Pendirian usaha < 1 tahun); (3) Penghasilan lebih dari Rp300.000 per hari sebelum PPKM Darurat; (4) Penghasilan lebih dari Rp300.000 per hari ketika PPKM Darurat; (5) Jam operasional lebih dari delapan jam sebelum PPKM Darurat; (6) Jam operasional kurang dari delapan jam ketika PPKM Darurat; (7) Kesetujuan atas PPKM Darurat; (8) Kesetujuan tentang adanya perpanjangan PPKM Darurat; (9) Dampak buruk PPKM Darurat terhadap usaha; (10) Penurunan pendapatan ketika PPKM Darurat terhadap usaha; (11) Bidang usaha yang ditekuni; (12) Cara mencukupi kebutuhan ketika PPKM Darurat; (13) Strategi pemasaran yang dilakukan ketika PPKM Darurat; (14) Manfaat PPKM Darurat bagi pelaku usaha; (15) Harapan pelaku usaha setelah adanya PPKM Darurat.

Di dalam angket/kuesioner terdapat pernyataan sebagai tanggapan dari variabel pertanyaan. Pernyataan tersebut berupa jawaban dengan kategori, Sesuai, Tidak Sesuai, dan pertanyaan dengan jawaban uraian secara singkat. Penilaian dari responden merupakan hasil kuesioner berdasarkan apa yang mereka rasakan atau alami.

a. Variabel kepemilikan lapak

Tabel 8. Kepemilikan Lapak

Lapak Merupakan Jenis Tempat Usaha yang Anda Tempati					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	19	63,3	63,3	63,3
	Tidak Sesuai	11	36,7	36,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab memiliki lapak sebanyak 19 orang, sedangkan yang tidak memiliki lapak sebanyak 11 responden.

- b. Variabel lama usaha (pendirian usaha < 1 tahun)

Tabel 9. Lama Usaha
Pendirian Usaha Kurang dari 1 Tahun

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	9	30,0	30,0	30,0
	Tidak Sesuai	21	70,0	70,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 9, jawaban responden tentang lama pendirian usaha adalah sebanyak 9 responden yang menjawab pendirian usahanya kurang dari 1 tahun, dan yang memiliki usaha lebih dari 1 tahun sebanyak 21 responden.

- c. Variabel penghasilan lebih dari Rp300.000 per hari sebelum PPKM Darurat

Tabel 10. Penghasilan Lebih dari Rp300.000 Per Hari
sebelum PPKM Darurat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	14	46,7	46,7	46,7
	Tidak Sesuai	16	53,3	53,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS, 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 10, responden yang menjawab penghasilan sehari sebelum PPKM Darurat lebih dari Rp300.000 sebanyak 14, sedangkan yang tidak sesuai sebanyak 16 responden.

- d. Variabel penghasilan kurang dari Rp300.000 per hari ketika PPKM Darurat

Tabel 11. Penghasilan Kurang dari Rp300.000 Per Hari
ketika PPKM Darurat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	27	90,0	90,0	90,0
	Tidak Sesuai	3	10,0	10,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, Sumber : SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 11, responden yang menjawab penghasilan sehari saat PPKM Darurat kurang dari Rp300.000 sebanyak 27, sedangkan yang penghasilannya tidak sesuai sebanyak 3 responden.

- e. Variabel jam operasional lebih dari delapan jam sebelum PPKM Darurat

Tabel 12. Jam Operasional Lebih dari Delapan Jam sebelum PPKM Darurat

Jam operasional lebih dari delapan jam sebelum PPKM Darurat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	12	40,0	40,0	40,0
	Tidak Sesuai	18	60,0	60,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 12, responden yang menjawab bahwa jam operasional sebelum PPKM Darurat lebih dari 8 jam adalah sebanyak 12, dan yang beroperasi lebih dari 8 jam sebanyak 18 responden.

- f. Variabel jam operasional kurang dari delapan jam ketika PPKM Darurat

Tabel 13. Jam Operasional Kurang dari Delapan Jam ketika PPKM Darurat

Jam operasional kurang dari delapan jam ketika PPKM Darurat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	25	83,3	83,3	83,3
	Tidak Sesuai	5	16,7	16,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 13, sebanyak 25 responden yang menerapkan jam operasional kurang dari 8 jam sedangkan 5 responden masih beroperasi lebih dari 8 jam.

- g. Variabel kesetujuan atas PPKM Darurat

Tabel 14. Kesetujuan atas PPKM Darurat

Apakah setuju dengan PPKM Darurat saat ini					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	7	23,3	23,3	23,3
	Tidak Sesuai	23	76,7	76,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 14 mengenai pertanyaan apakah setuju dengan PPKM Darurat saat ini, sebanyak 7 responden yang menyetujui dan 23 responden yang tidak setuju dengan penerapan PPKM Darurat.

h. Variabel kesetujuan adanya perpanjangan PPKM Darurat

**Tabel 15. Kersetujuan Adanya Perpanjangan PPKM Darurat
Apabila PPKM Darurat diperpanjang apakah setuju**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	6	20,0	20,0	20,0
	Tidak Sesuai	24	80,0	80,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 15 mengenai pertanyaan apakah setuju apabila penerapan PPKM Darurat diperpanjang, sebanyak 6 responden yang setuju dengan perpanjangan tersebut dan sebanyak 24 responden yang tidak setuju.

i. Variabel dampak buruk PPKM Darurat terhadap usaha

**Tabel 16. Dampak Buruk PPKM Darurat terhadap Usaha
PPKM Darurat ini berdampak buruk bagi usaha anda**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	26	86,7	86,7	86,7
	Tidak Sesuai	4	13,3	13,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 16, pendapat responden mengenai PPKM Darurat ini apakah berdampak buruk bagi usaha mereka, dijawab oleh responden sebanyak 26 yang sesuai dengan keadaan bahwa berdampak buruk bagi usahanya dan sebanyak 4 responden yang tidak sesuai.

j. Variabel penurunan pendapatan selama PPKM Darurat terhadap usaha

**Tabel 17. Penurunan Pendapatan ketika PPKM Darurat
Apakah terjadi penurunan pendapatan ketika PPKM Darurat**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sesuai	28	93,3	93,3	93,3
	Tidak Sesuai	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 17, pendapat responden mengenai apakah terjadi penurunan pendapatan selama PPKM Darurat, sebanyak 28 responden yang mengalami penurunan pendapatan dan sebanyak 2 responden yang tidak sesuai.

k. Variabel Bidang usaha yang ditekuni

Tabel 18. Bidang Usaha yang Ditekuni

Usaha yang anda tekuni di bidang					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	Ayam potong	1	3,3	3,3	3,3
	Bakso	1	3,3	3,3	6,7
	Fashion (mendreng)	1	3,3	3,3	10,0
	Jual jajan tradisional	1	3,3	3,3	13,3
	Kebutuhan pokok	1	3,3	3,3	16,7
	Konter	1	3,3	3,3	20,0
	Kue homemade	1	3,3	3,3	23,3
	Laundry	1	3,3	3,3	26,7
	Makanan (warung nasi dan kopi)	1	3,3	3,3	30,0
	Makanan ringan	1	3,3	3,3	33,3
	Menerima pesanan makanan	1	3,3	3,3	36,7
	Olshop perabotan rumah tangga	1	3,3	3,3	40,0
	Penjual baju keliling	1	3,3	3,3	43,3
	Penjual bakso	1	3,3	3,3	46,7
	Penjual ikan keliling	1	3,3	3,3	50,0
	Penjual jajanan sekolah	1	3,3	3,3	53,3
	Penjual kerupuk keliling	1	3,3	3,3	56,7
	Penjual peralatan tulis menulis	1	3,3	3,3	60,0
	Penjual sayur keliling	1	3,3	3,3	63,3
	Penjual tahu keliling	1	3,3	3,3	66,7
	Penjualan perlengkapan sekolah	1	3,3	3,3	70,0
	Percetakan dan fotocopy	1	3,3	3,3	73,3
	Toko kelontong	1	3,3	3,3	76,7
	Toko makanan ringan	1	3,3	3,3	80,0
	Toko sembako	4	13,3	13,3	93,3
	Warung kopi	1	3,3	3,3	96,7
Warung kopi wifi	1	3,3	3,3	100,0	
Total		30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 18, mengenai bidang usaha yang ditekuni responden, dapat dilihat bahwa lebih banyak responden yang membuka usaha toko sembako, yaitu sebanyak 4 orang, sementara bidang usaha yang lain hanya ditekuni masing-masing sebanyak 1 orang.

1. Variabel bagaimana cara mencukupi kebutuhan selama PPKM Darurat.

Tabel 19. Cara Mencukupi Kebutuhan ketika PPKM Darurat
Bagaimana cara anda mencukupi kebutuhan ketika PPKM Darurat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Dari hasil penjualan toko	1	3,3	3,3	3,3
	Dari hasil warung dan anak	1	3,3	3,3	6,7
	Dengan menjual keliling setiap hari	1	3,3	3,3	10,0
	Dengan pendapatan suami	1	3,3	3,3	13,3
	Dengan tetap berjualan	1	3,3	3,3	16,7
	Dengan tetap berjualan melalui <i>online shop</i> karena lebih efektif	1	3,3	3,3	20,0
	Dengan tetap berjualan meski sepi	1	3,3	3,3	23,3
	Dengan tetap berjualan untuk mencukupi kebutuhan	1	3,3	3,3	26,7
	Dengan tetap membuka	1	3,3	3,3	30,0
	Hasil dari usaha sampingan	1	3,3	3,3	33,3
	Hasil jual bakso	1	3,3	3,3	36,7
	Hasil <i>laundry</i>	1	3,3	3,3	40,0
	Hasil panen	1	3,3	3,3	43,3
	Hasil penjualan	1	3,3	3,3	46,7
	Hasil penjualan dan kerja serabutan	1	3,3	3,3	50,0
	Hasil penjualan sayur	1	3,3	3,3	53,3
	Hasil penjualan usaha	1	3,3	3,3	56,7
	Menjual ayam	1	3,3	3,3	60,0
	Nafkah dari suami	1	3,3	3,3	63,3
	Nafkah suami	4	13,3	13,3	76,7
	Nafkah suami dan penjualan toko	1	3,3	3,3	80,0
	Tetap berjualan	2	6,7	6,7	86,7
	Tetap berjualan dengan sedikit mengurangi porsi	1	3,3	3,3	90,0
	Tetap buka, tetap berjualan	1	3,3	3,3	93,3
Tetap melakukan penjualan	1	3,3	3,3	96,7	
Tetap membuka toko dan gaji orang tua	1	3,3	3,3	100,0	
Total	30	100,0	100,0		

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 19, pendapat responden mengenai pertanyaan bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ketika PPKM Darurat, sebagian besar menjawab dari hasil penjualan, nafkah suami, gaji anak, gaji orang tua dan bekerja serabutan.

m. Variabel strategi pemasaran yang dilakukan ketika PPKM Darurat

Tabel 20. Strategi Pemasaran yang Dilakukan ketika PPKM Darurat
Strategi pemasaran anda lakukan ketika PPKM Darurat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	-	2	6,7	6,7	6,7
	Antar jemput cucian	1	3,3	3,3	10,0
	Dengan keliling	1	3,3	3,3	13,3
	Dengan media sosial	1	3,3	3,3	16,7
	Dijual keliling	1	3,3	3,3	20,0
	Hanya berjualan alat tulis seperti biasa	1	3,3	3,3	23,3
	Jual di pasar	1	3,3	3,3	26,7
	Jual keliling	2	6,7	6,7	33,3
	Promosi di sosial media	1	3,3	3,3	36,7
	Sama seperti sebelum PPKM	1	3,3	3,3	40,0
	Seperti sebelum PPKM, tetap sama	1	3,3	3,3	43,3
	Tetap berjualan dan mematuhi prokes	1	3,3	3,3	46,7
	Tetap berjualan di rumah	1	3,3	3,3	50,0
	Tetap buka meskipun PPKM namun juga mematuhi protokol kesehatan	1	3,3	3,3	53,3
	Tetap keliling juga dengan sosial media	1	3,3	3,3	56,7
	Tetap konsisten dalam promosi melalui sosial media	1	3,3	3,3	60,0
	Tetap mematuhi prokes dan buka hingga jam yang ditentukan	1	3,3	3,3	63,3
	Tetap membuka toko dan mematuhi prokes	1	3,3	3,3	66,7
	Tidak ada	4	13,3	13,3	80,0
	Tidak ada seperti biasanya saja	1	3,3	3,3	83,3
Tidak ada strategi	1	3,3	3,3	86,7	
Tidak ada strategi apa-apa	1	3,3	3,3	90,0	
Tidak ada strategi pemasaran	1	3,3	3,3	93,3	
Tidak ada strategi tetap seperti sebelum PPKM	1	3,3	3,3	96,7	

Strategi pemasaran anda lakukan ketika PPKM Darurat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak ada strategi, tetap sama	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 20, pendapat responden mengenai strategi pemasaran yang dilakukan pelaku usaha ketika PPKM Darurat adalah dengan tetap membuka usaha atau toko tersebut sembari menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dijual keliling atau jemput bola, beralih ke penjualan *online* dan ada juga yang tidak menggunakan strategi pemasaran.

- n. Variabel manfaat PPKM Darurat bagi pelaku usaha

Tabel 21. Manfaat PPKM Darurat bagi Pelaku Usaha

Apa manfaat PPKM Darurat untuk pelaku usaha seperti anda					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	-	5	16,7	16,7	16,7
	Dapat membantu mengurangi orang berbelanja jauh	1	3,3	3,3	20,0
	Dikarenakan tidak boleh tatap muka, maka penjualan <i>online</i> sangat dibutuhkan untuk mencegah kontak fisik	1	3,3	3,3	23,3
	Lebih banyak orang yang tidak belanja jauh	1	3,3	3,3	26,7
	Penghasilan berkurang	1	3,3	3,3	30,0
	Rugi	1	3,3	3,3	33,3
	Sebagai pelaku usaha saya rasa tidak ada	1	3,3	3,3	36,7
	Tidak ada	5	16,7	16,7	53,3
	Tidak ada manfaat	4	13,3	13,3	66,7
	Tidak ada manfaat bahkan rugi	1	3,3	3,3	70,0
	Tidak ada manfaat malah rugi	1	3,3	3,3	73,3
	Tidak ada manfaatnya	3	10,0	10,0	83,3
	Tidak ada manfaatnya dengan usaha saya	1	3,3	3,3	86,7
	Tidak ada manfaatnya sama sekali	1	3,3	3,3	90,0
	Tidak ada, malah jadi rugi	1	3,3	3,3	93,3

Apa manfaat PPKM Darurat untuk pelaku usaha seperti anda					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak ada, semakin memperburuk	1	3,3	3,3	96,7
	Tidak bermanfaat	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 21, mengenai manfaat PPKM Darurat yang mereka rasakan yaitu sebagian besar responden menjawab tidak ada manfaat karena mengalami penurunan pendapatan, sedangkan beberapa responden menjawab ada manfaatnya sebab pembeli tidak perlu jauh-jauh datang ke lapak pedagang, mengingat adanya aturan tidak boleh tatap muka, sehingga penjualan melalui *online* sangat dibutuhkan untuk mencegah kontak fisik.

- o. Variabel harapan pelaku usaha setelah adanya PPKM Darurat ini

Tabel 22. Harapan Pelaku Usaha setelah Adanya PPKM Darurat

Harapan Pelaku Usaha setelah Adanya PPKM Darurat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Banyak pembeli dan pandemi hilang	1	3,3	3,3	3,3
	Bumi membaik dan usaha lancar	1	3,3	3,3	6,7
	Diharapkan lebih ramai penjualannya	1	3,3	3,3	10,0
	Harapan saya agar PPKM dapat memutus rantai penularan Covid dan penjualan lebih ramai lagi	1	3,3	3,3	13,3
	Laris manis	1	3,3	3,3	16,7
	Pembeli makan banyak dan ramai	1	3,3	3,3	20,0
	Pembeli/pesanan lebih banyak lagi	1	3,3	3,3	23,3
	Penjualan lebih ramai	1	3,3	3,3	26,7
	Semakin laku lebih banyak lagi	1	3,3	3,3	30,0
	Semoga dapat bantuan dari pemerintah dan semoga pandemi berlalu	1	3,3	3,3	33,3
	Semoga ekonomi kembali pulih	1	3,3	3,3	36,7
	Semoga keadaan bumi membaik	1	3,3	3,3	40,0
	Semoga kembali ramai lagi	1	3,3	3,3	43,3
	Semoga laku lebih banyak lagi setelah PPKM	1	3,3	3,3	46,7
	Semoga laris	1	3,3	3,3	50,0
	Semoga lebih banyak lagi pembeli setelah PPKM	1	3,3	3,3	53,3
	Semoga pandemi berlalu dan ekonomi pulih	1	3,3	3,3	56,7
Semoga pandemi cepat berlalu	1	3,3	3,3	60,0	
Semoga pandemi cepat berlalu dan penjualan lebih ramai lagi	1	3,3	3,3	63,3	

Harapan Pelaku Usaha setelah Adanya PPKM Darurat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Semoga pandemi cepat selesai dan penjualan normal kembali di sekolah	1	3,3	3,3	66,7
	Semoga pandemi segera berakhir dan warung ramai lagi	1	3,3	3,3	70,0
	Semoga pandemi segera hilang	1	3,3	3,3	73,3
	Semoga penjualan normal lagi dan naik namun tetap dijaga prosesnya	1	3,3	3,3	76,7
	Semoga PPKM segera berlalu	1	3,3	3,3	80,0
	Semoga setelah PPKM ada bantuan dari pemerintah	1	3,3	3,3	83,3
	Semoga setelah PPKM kegiatan normal lagi dan penjualan meningkat	1	3,3	3,3	86,7
	Semoga setelah PPKM semakin ramai pembeli	1	3,3	3,3	90,0
	Semoga usaha saya nantinya lebih ramai /laku lagi dari biasanya	1	3,3	3,3	93,3
	Tidak ada Covid-19	1	3,3	3,3	96,7
	Usaha lebih ramai lagi	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

(Pengolahan Data Penelitian, SPSS 16.0, 2021)

Berdasarkan tabel 22 pendapat responden mengenai harapan setelah PPKM Darurat ini adalah sebagian besar berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga tingkat penjualan atau pendapatan dapat kembali seperti sediakala, perekonomian menjadi lebih stabil dan kembali normal seperti seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis, untuk mengetahui Pengaruh PPKM Darurat pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan Pendapatan UMKM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Desa Bandungsari, Sukodadi, Lamongan) dengan menggunakan data SPSS 16.0, yang terdiri dari beberapa variabel (1) Kepemilikan lapak; (2) Lama Usaha (Pendirian usaha < 1 tahun); (3) Penghasilan lebih dari Rp300.000 per hari sebelum PPKM Darurat; (4) Penghasilan lebih dari Rp300.000 per hari ketika PPKM Darurat; (5) Jam operasional lebih dari delapan jam sebelum PPKM Darurat; (6) Jam operasional kurang dari delapan jam ketika PPKM Darurat; (7) Kesetujuan atas PPKM Darurat; (8) Kesetujuan tentang adanya perpanjangan PPKM Darurat (9) Dampak buruk PPKM Darurat terhadap usaha; (10) Penurunan pendapatan ketika PPKM Darurat terhadap usaha; (11) Bidang usaha yang ditekuni; (12) Cara mencukupi kebutuhan ketika PPKM Darurat; (13) Strategi pemasaran yang dilakukan ketika PPKM Darurat; (14) Manfaat

PPKM Darurat bagi pelaku usaha; (15) Harapan pelaku usaha setelah adanya PPKM Darurat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, untuk wilayah Jawa dan Bali supaya dilakukan PPKM Darurat Covid-19 sesuai dengan kriteria level situasi dan kondisi pandemi yang terjadi di masing-masing wilayah yaitu dengan menerapkan pembatasan dalam skala kecil kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerumunan serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 untuk mengurangi penularan virus di tingkat desa dan kelurahan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pelaku UMKM ketika mengalami penurunan pendapatan yaitu dengan beralih dari memasarkan produknya secara *offline* menjadi berbasis *online* melalui *marketplace*, misalnya dengan menjadi *reseller*, *dropshipper*, dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah menghasilkan pendapatan tambahan.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat tergerak untuk mencari dan mempelajari referensi lainnya yang relevan dengan pembahasan jurnal ini agar menambah pemahaman pembaca yang selanjutnya dapat dijadikan pemantik oleh pembaca untuk melahirkan ide dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema dan topik yang berkaitan dengan pengaruh penerapan PPKM darurat terhadap penurunan pendapatan UMKM pada pelaku usaha ketika wabah Covid-19 berjangkit di berbagai tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal brand*. 2(1), 123-130. Retrieved from <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Baskara : Journal of Business & Entrepreneurship*, 83-92.
- Idhom, A. (t.thn.). *Update Corona 14 Mei 2020 di Indonesia & Dunia : Data Kasus Terkini*. Dipetik November 16, 2020, dari [tirto.id](https://tirto.id/update-corona-14-mei-2020-di-indonesia-dunia-info-data-hari-ini-fty7): <https://tirto.id/update-corona-14-mei-2020-di-indonesia-dunia-info-data-hari-ini-fty7>
- Katadata. (t.thn.). Dipetik Juli 26, 2021, dari <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60dc6b56b3d99/daftar-lengkap-kota-dan-kabupaten-yang-akan-terkena-ppkm-mikro-darurat>
- News, A. (2021, Juli 5). Dipetik Juli 19, 2021, dari <https://www.antaraneews.com/berita/2249426/dampak-ppkm-darurat-terhadap-perekonomian-dinilai-minim>
- SINDO, K. (2021, Februari 26). Dipetik Juli 26, 2021, dari <https://nasional.sindonews.com/read/346920/18/dampak-ppkm-bagi-umkm-1614254551>
- Soewadji, Jusuf M A. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Mitra Wacana Media: Yunus.

- Sudjarwo, E. (t.thn.). Dipetik Juli 26, 2021, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5639655/mobilitas-warga-lamongan-disebut-menurun-saat-ppkm-darurat>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap umkm di indonesia. *Jurnal brand*, 2(1), 147–153.
- Wikipedia. (t.thn.). Dipetik Juli 26, 2021, dari https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandungsari,_Sukodadi,_Lamongan&oldid=16673815
- _____. (2021, Juli 2). *INMENDAGRI NO 15 TAHUN 2021 TENTANG PPKM DARURAT.pdf*. Diambil kembali dari covid19.go.id: <https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/Juli/INMENDAGRI%20NO%2015%20TAHUN%202021%20TENTANG%20PPKM%20DARURAT.pdf>
- _____. (2021, Juli 3). *INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2021*. Diambil kembali dari lamongankab.go.id: <https://lamongankab.go.id/documents/portal/Instruksi-Bupati-Lamongan-PPKM-Darurat.pdf>